



**PIDATO MENTERI KEUANGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TENTANG JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 24 Agustus 2021
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO MENTERI KEUANGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TENTANG**

**JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
TANGGAL 24 AGUSTUS 2021**

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
kami hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, beserta Nota Keuangannya.

Pimpinan Sidang serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Perkenankanlah kami memberikan apresiasi terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang disampaikan oleh Ibu Mercy Chriesty Barends **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, Bapak H. Agung Widyanoro **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, Bapak Wihadi Wiyanto **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, Bapak Willy Aditya **Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem)**, Ibu Siti Mukaromah **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, Bapak Rizki Aulia Rahman Natakusumah **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, Bapak H. Hermanto **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, Bapak Slamet Ariyadi **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan Bapak Sy. Anas Thahir **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)** yang memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini kekuatan kolektif dari seluruh komponen bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh tidak hanya dalam

menghadapi pandemi Covid-19 namun juga berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menjadi tantangan bagi negara mana pun di dunia. Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat bahwa pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pemerintah akan tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan penularan dengan mengakselerasi vaksinasi seluas-luasnya, memperkuat sistem kesehatan nasional serta mendorong penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru *“living with endemic”*.

APBN masih menjadi instrumen penting dan utama untuk pemulihan ekonomi, sehingga APBN harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif, dan fleksibel. Untuk itu, RAPBN tahun 2022 akan fokus pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural untuk mengakselerasi pemulihan. RAPBN tahun 2022 disiapkan untuk dapat merespon dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat. Tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah juga sangat berterima kasih atas perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terus mendorong pengelolaan fiskal agar lebih sehat dan berkesinambungan di tengah upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan

konsolidasi fiskal di tahun 2022 yang disertai penguatan reformasi fiskal agar proses transisi menuju defisit di bawah 3% PDB di tahun 2023 dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, APBN semakin efektif menjadi jangkar yang kuat dalam menopang pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PAN, F-PKS,** dan **F-PPP** terkait asumsi pertumbuhan ekonomi dapat disampaikan bahwa Pemerintah memiliki optimisme yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat di tahun 2022. Optimisme tersebut tentunya sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara akan tergantung pada pengendalian kasus Covid-19, termasuk bagaimana akses dan pelaksanaan vaksinasi serta adaptasi kebiasaan baru di setiap negara. Dengan perluasan vaksinasi dan penanganan pandemi yang semakin baik di Indonesia, masyarakat dan dunia usaha semakin yakin melaksanakan aktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat sangat mungkin kita capai jika kasus Covid-19 dapat kita kendalikan. Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di awal pertengahan tahun 2021 menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan Covid-19, agar momentum pemulihan dapat kembali berlanjut. Meskipun momentum pemulihan memberikan dasar untuk optimis, Pemerintah

juga menyadari perlunya kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari dinamika Covid-19 maupun faktor eksternal lainnya termasuk perkembangan geopolitik global.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara komprehensif, Pemerintah memandang bahwa rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0– 5,5 persen di tahun 2022 merupakan asumsi yang potensial dapat dicapai. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan didukung langkah reformasi struktural yang terus dilakukan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja investasi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** agar kebijakan fiskal ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong peningkatan akses maupun kualitas kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat perlindungan sosial.

APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen *counter cyclical* dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih. Kebijakan perlindungan sosial yang diperluas saat ini, berperan sangat penting terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif

terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pemerintah juga sejalan dengan pandangan **F-PDIP**, **F-PKB**, dan **F-PKS** untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan (NTP dan NTN). Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap dapat tumbuh positif di masa pandemi. Sektor tersebut juga berperan penting baik dalam menjaga ketahanan pangan nasional, maupun dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja positif sektor pertanian juga diikuti tren positif NTP dan NTN yang mengindikasikan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan Pemerintah untuk sektor pertanian, perbaikan NTP dan NTN diharapkan terus berlanjut dan masing-masing diperkirakan akan berada pada kisaran 103 – 105 dan 104 – 106 pada tahun 2022.

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah menghargai pandangan dan perhatian dari **F-PDIP**, **F-Partai Golkar**, **F-Partai Gerindra**, **F-Partai NasDem**, **F-PKB**, **F-PKS**, **F-PAN**, dan **F-PPP** terkait target penerimaan perpajakan yang disusun oleh Pemerintah. Dalam menyusun target penerimaan perpajakan, pemerintah senantiasa berusaha mengedepankan kecermatan serta rasionalitas yang tentunya sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. Di sisi lain, Pemerintah juga memperhatikan berbagai faktor perekonomian lainnya seperti kondisi sektoral, iklim investasi, daya saing usaha, sebagai refleksi basis perpajakan serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian diharapkan perpajakan tidak hanya untuk mendukung pendanaan pembangunan, namun sebagai instrumen yang dapat menciptakan keseimbangan di dalam aktivitas perekonomian.

Dalam upaya menggali potensi perpajakan, Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan yang terus disesuaikan dan disempurnakan agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Sistem administrasi perpajakan terus diperbaiki dengan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-Partai Golkar, F-PKB, F-PKS, dan F-PAN** dalam mendukung reformasi perpajakan. Tujuan dari reformasi adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan untuk meminimalkan distorsi dan adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha, dan perpajakan global, serta menjamin kepastian hukum.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan untuk memperkuat reformasi di sisi administrasi. Implementasi sistem *single submission* dalam *National Logistic Ecosystem* merupakan salah satu perbaikan dari sisi administrasi untuk mendukung agenda reformasi struktural. Sementara itu, dari sisi pengawasan, Pemerintah juga memperkuat kerja sama lintas Kementerian/Lembaga bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara melalui pengembangan sistem pengawasan.

Terhadap pandangan **F-Partai Demokrat, F-PAN, dan F-PKS** terkait target PNBPN dapat kami sampaikan bahwa kontribusi PNBPN terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan pengelolaan yang semakin membaik. Peran PNBPN sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada

masyarakat. Namun demikian, optimalisasi yang dilakukan tetap akan memperhatikan faktor keberlanjutan Sumber Daya Alam, kondisi daya beli masyarakat, serta kesehatan kinerja keuangan BUMN dan Badan Layanan Umum.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan pandangan **F-PDIP, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** agar RAPBN 2022 tetap mendukung berbagai program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melalui APBN mengambil peran sentral dalam menjaga pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2022 tetap akan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Berbagai program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perekonomian masih akan berlanjut pada tahun 2022.

APBN Tahun Anggaran 2022 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dan target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai.

Pemerintah sangat mengapresiasi atas berbagai pandangan dan masukan terkait penanganan kesehatan yang disampaikan oleh **F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PAN, F-PKS, dan F-PPP**. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Dari anggaran tersebut, alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan

mencapai Rp115,9 triliun melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan guna melindungi keselamatan masyarakat seluas-luasnya. Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (*testing, tracing, and treatment*), klaim biaya perawatan pasien covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.

Program vaksinasi masih menjadi fokus Pemerintah, melalui berbagai upaya akselerasi guna mewujudkan kekebalan komunal atau *herd immunity*. Sampai dengan bulan Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan upaya percepatan vaksinasi diantaranya melalui pelibatan pemda, personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN. Pada tahun 2022, upaya menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin akan terus diupayakan, antara lain dengan menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dan mengupayakan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya percepatan vaksinasi akan dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN maupun skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu.

Pemerintah juga terus mendorong agar kampanye/edukasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) tetap berlangsung, sehingga penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

Selanjutnya, Pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kualitas anggaran kesehatan sebagaimana masukan **F-PKS**. Kebijakan anggaran kesehatan akan diarahkan untuk mendukung reformasi sistem

kesehatan, dalam bentuk: *Pertama*, Transformasi Layanan Primer, antara lain melalui penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi); *Kedua*, Transformasi Layanan Rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi Rumah Sakit, serta peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan; *Ketiga*, Transformasi Ketahanan Kesehatan, antara lain dalam bentuk peningkatan kemandirian farmasi dan alkes serta penguatan ketahanan tanggap darurat; *Keempat*, Peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan; *Kelima*, Pengembangan Teknologi Informasi dalam layanan kesehatan, seperti *telemedicine* serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas dan RS. Dengan langkah reformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan anggaran kesehatan dapat memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra dan F-PKS** untuk tetap memberikan perhatian terhadap program perlindungan sosial dalam rangka membantu masyarakat rentan dan miskin terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dalam rangka peningkatan efektifitasnya untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Pandangan **F-Partai Demokrat** untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah optimis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menysasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian **F-PKB**, **F-Partai Demokrat**, **F-PKS**, dan **F-PPP** yang mendukung pelaksanaan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik. Pada tahun 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Sejalan dengan pandangan **F-PKB**, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan.

Pimpinnan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PAN**, dan **F-PKS** agar Pemerintah dapat mengarahkan anggaran TKDD supaya sejalan dengan desentralisasi yang berjalan baik dan percepatan pembangunan yang berbasis pemerataan, mendukung pemulihan ekonomi, menjaga kesehatan, memberikan perlindungan sosial serta mendorong pemanfaatan dana desa untuk program prioritas desa, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah sependapat untuk terus memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan TKDD tahun 2022 yang secara umum diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan efektifitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas di desa.

Sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusional sesuai Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menyusun RUU Tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (RUU HKPD) sebagai pembaharuan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, RUU HKPD disusun sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, rangkaian kebijakan yang diatur dalam RUU HKPD diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari tujuan bernegara.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pemerintah menghargai pandangan **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-PKS, dan F-PPP** bahwa pembiayaan anggaran agar dikelola dengan cermat, terukur, dan hati-hati. Pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan anggaran akan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan memanfaatkan momentum di pasar keuangan dan mengedepankan kehati-hatian yang tinggi untuk mendukung APBN 2022.

Pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk pembiayaan utang yang terus ditingkatkan produktivitasnya. Kebijakan utang, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini, merupakan bagian dari kebijakan fiskal *counter cyclical* untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman krisis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menghindari *opportunity loss* sehingga pada gilirannya pembiayaan yang dilakukan dapat menjadi aset di masa depan.

Sehubungan dengan pandangan **F-PKS** atas kebijakan pembiayaan investasi di masa pandemi Covid-19, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen menjadikan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Namun demikian, Pemerintah memandang keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap menjadi hal yang penting untuk diteruskan. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, khususnya yang bersifat padat karya, tentunya akan menjadi stimulus tersendiri dan diharapkan akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian salah satunya dengan menciptakan banyak lapangan kerja.

Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur prioritas. Alokasi investasi utamanya ditujukan untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan agar proyek tersebut tidak berhenti serta mendukung proyek strategis nasional lainnya. Keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas perekonomian masyarakat.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI berkenaan dengan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Tanggapan atas Pemandangan Umum yang lengkap dan terinci kami sampaikan juga di dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisah dari jawaban yang telah kami sampaikan saat ini.

Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022

beserta Nota Keuangannya, pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**Jakarta, 24 Agustus 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,**

ttd

Sri Mulyani Indrawati